

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Asikin, Zainal dkk, 2004 *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung:
- Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia-Hukum perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djokosantoso Moeljono, 2004, *"Reinvensi BUMN: Empat Strategi Membangun BUMN kelas dunia"* (Cetakan Pertama), Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- H.R Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H.S., Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta.

Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aabardin, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Subagyo, Joko. 2006, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*. Rineka Cipta, Jakarta.

Suhardana, F.X, 2008, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaya, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Yogyakarta

ARTIKEL JURNAL

Annullah & Partner Law Firm, *Pendapat hukum atas Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gradu Induk 150 kV Cilegon Baru II*, Jakarta, 2017.

Asnawi, M Natsir, 2017, “*perlindungan hukum dalam perspektif hukum kontrak kontemporer*” Jurnal Masalah-masalah hukum jilid 46 Vol. Universitas, Diponegoro, 2017.

Hasanah, Hetty, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml> 2004).

Suherman, *Perkembangan Asas-Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

TESIS

Bawono, Haryo, Tesis *Perlindungan Hukum Bagi PT.Pertamina (Persero) Atas Pendaftaran Hak Paten Security Cap Pada Kemasan Botol Pelumas Oleh Perusahaan Rekanan*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.

Casidy, Ryan, Tesis : *“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Zulkifli, Tesis, *Tinjauan Kontrak Pengadaan Pemerintah menurut Hukum Perdata*, pada tahun Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

SKRIPSI

Sabaroedin, Justicia, Skripsi , *Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0554.K/DIR/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 166.K/DIR/2012 tentang Pedoman Pemberian/Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) Kepada Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Keputusan Menteri ESDM Nomor 0171.K/90/MEM/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tentang penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang semula dibiayai dari APBN menjadi APLN.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastructure Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 Tanggal 5 Juli 2006 tentang Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara.

Perjanjian Nomor 126.PJ/133/UIP JJB/2011 tentang Pembangunan GI 150 kV Cilegon Baru II (Perjanjian Pembangunan Gardu Induk Cilegon Baru) dengan Anggaran DIPA tahun 2011-2013 berserta amandemenya.

Perjanjian Pengalihan No.001.PJ/KON.02.04/UIPJJB/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Perjanjian Pembangunan Gardu Induk Cilegon Baru II.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

INTERNET

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian ESDM, di <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-0171-2015.pdf>, (diakses 15 Januari 2019 pukul 14.11).

Hukum Online, 2011, Bagaimana Menggugat Konsorsium di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9156749f290/bagaiman-a-menggugat-konsorsium>, (diakses 25 Februari 2019 Pukul 08.00).

Abdi Basariyadi, *Wawancara: Pengertian, jenis dan Tujuan dan Ciri-Ciri*, [www.majalahpendidikan.com/wawancara-pengertian-jenis-tujuan dan ciri-ciri/](http://www.majalahpendidikan.com/wawancara-pengertian-jenis-tujuan-dan-ciri-ciri/), diakses 15 Mei 2019, Pukul 10.53

SEMINAR

Ningrum N.S., et. al., *“Prosiding Seminar Publik Kriminalisasi Pengadaan barang dan/atau Jasa dalam Lingkungan BUMN”*